



KENDARAAN ENERGI BARU DI TIONGKOK

Kendaraan energi baru menjadi sorotan pada Konvensi Manufaktur Dunia 2022 di Hefei, Provinsi Anhui, Tiongkok Timur yang diadakan Selasa (20/9) hingga Jumat (23/9). Konvensi yang menyoroti produk, teknologi, dan aplikasi terbaru di sektor manufaktur tersebut bertema Menciptakan dunia yang indah melalui manufaktur, menampilkan 40 acara, termasuk pameran dan seminar. Dikuti 640 perusahaan dan 568 proyek dengan total investasi 367,7 miliar yuan diperkirakan akan ditandatangani selama acara tersebut.

## Presiden Iran Ancam Tindak Pengunjuk Rasa

Presiden Iran telah memerintahkan penyelidikan terkait kematian Amini.

**NEW YORK (IM)** - Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan, tindakan kekejaman tidak dapat diterima. Dia memberikan peringatan kepada para pengunjuk rasa yang turun ke jalan-jalan di seluruh negeri dalam kemarahan atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral.

"Ada kebebasan berekspresi di Iran tetapi tindakan kekejaman tidak dapat diterima," kata Raisi, yang menghadapi protes terbesar di Iran sejak 2019, berbicara pada konferensi pers di sela-sela Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Raisi menegaskan, telah

memerintahkan penyelidikan atas kasus yang menimpa perempuan berusia 22 tahun itu. Dia mengatakan, cakupan luas kasus Amini adalah hasil dari standar ganda.

"Setiap hari di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, kami melihat pria dan wanita tewas dalam bentrokan dengan polisi, tetapi tidak ada kepekaan tentang penyebab dan penanganan kekerasan ini," katanya.

Kementerian Intelijen Iran juga mencoba mematahkan momentum demonstrasi. Badan ini mengatakan, menghadiri protes adalah ilegal dan siapa pun yang ambil bagian akan menghadapi tuntutan.

Sedangkan Pengawal Revolusi Iran meminta pengadilan untuk mengadili kelompok yang menyebarkan berita palsu dan desas-desus. Desakan ini dalam upaya nyata untuk meredakan demonstrasi nasional.

Perempuan telah memainkan peran penting dalam demonstrasi, melambatkan dan membakar cadar. Bahkan beberapa perempuan di depan umum memotong rambut sebagai tantangan langsung kepada para pemimpin ulama.

Para pengunjuk rasa di Teheran dan kota-kota lain membakar kantor polisi dan kendaraan karena kemarahan atas kematian Amini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Laporan terjadi penyerangan terhadap pasukan keamanan.

Sebuah video di akun Twitter 1500tasvir menunjukkan protes di kota Bukan barat laut

dengan suara tembakan di latar belakang. Posting media sosial mengatakan demonstrasi telah menyebar ke sebagian besar dari 31 Provinsi Iran.

Sebagian besar kerusuhan terkonsentrasi di barat laut Iran yang berpenduduk Kurdi tetapi telah menyebar ke ibu kota dan setidaknya 50 kota besar dan kecil. Polisi menggunakan kekuatan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sebagai balasan, protes pro-pemerintah berlangsung pada Jumat (23/9).

Selain itu, kelompok pemantau internet Netblocks di Twitter menyatakan, gangguan internet seluler terjadi di negara itu. Kondisi ini sebagai tanda kemungkinan bahwa pihak berwenang khawatir protes akan meningkat. Kematian Amini telah menyalaikan kembali kemarahan atas isu-isu termasuk pembatasan kebebasan pribadi

di Iran, termasuk aturan berpakaian yang ketat untuk perempuan. Ditambah lagi negara ini sedang menghadapi ekonomi yang terguncang akibat sanksi.

Laporan kelompok hak asasi Kurdi Hengaw yang tidak dapat diverifikasi oleh Reuters mengatakan, jumlah korban meninggal di daerah Kurdi telah meningkat menjadi 15 dan jumlah yang terluka menjadi 733. Para pejabat Iran telah membantah bahwa pasukan keamanan telah membunuh para pengunjuk rasa, menunjukkan bahwa mereka mungkin telah ditembak oleh para pembangkang bersenjata.

Para penguasa Iran khawatir akan kebangkitan kembali protes 2019 yang meletus karena kenaikan harga bensin, yang paling berdarah dalam sejarah negara itu. Reuters melaporkan, pada protes itu sebanyak 1.500 orang meninggal dunia. ● tom

## Ribuan Anak di Suriah Berisiko Terkena Kolera Akibat Krisis Air

**DAMASKUS (IM)** - Kekurangan air yang didorong oleh perubahan iklim dan konflik menempatkan ribuan anak di utara dan timur Suriah berisiko mengidap kolera.

LSM Save the Children memperingatkan, sedikitnya 24 orang meninggal karena penyakit yang ditularkan melalui air itu.

Setidaknya 24 orang telah meninggal karena penyakit itu, dan beberapa ribu kasus yang dicurigai telah dilaporkan di seluruh negeri pada 19 September, menurut data yang diambil badan amal dari Kementerian Kesehatan Suriah dan Komite Kesehatan Administrasi Otonomi Suriah Utara dan Timur.

Kami melihat akan ada wabah besar jika kami tidak bertindak sekarang, wabah yang sudah memperburuk kebutuhan perlindungan anak-anak di seluruh Suriah, menambah penderitaan mereka," kata Direktur sementara Save the Children, Beat Rohr, dilansir dari Alarabiya pada Kamis (22/9).

Wabah penyakit saat ini yang menyebabkan diare, muntah, kehausan, dan dalam kasus terburuk kematian, diperkirakan disebabkan masyarakat yang minim air dan makanan yang terin-

feksi yang diairi Sungai Efrat negara itu.

Sungai itu mengalami tingkat aliran rendah dalam sejarah terutama karena kekeringan terburuk Suriah dalam beberapa dekade.

Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu memperingatkan tentang beratnya wabah di Suriah, mengatakan bahwa penghancuran infrastruktur air yang meluas dari perang berarti sebagian besar penduduk bergantung pada sumber air yang tidak aman.

"Ini adalah wabah kolera pertama yang dikonfirmasi dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran geografis menimbulkan kekhawatiran, jadi kami harus bergerak cepat," kata Direktur Darurat Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Wilayah Mediterania Timur, Richard Brennan.

Wabah itu berpusat di wilayah Aleppo utara, di mana lebih dari 70 persen dari total 936 kasus yang dicurigai telah dicatat, dan Deir Ezzor di mana lebih dari 20 persen terdaftar.

Sebelum wabah kolera baru-baru ini, krisis air telah menyebabkan peningkatan penyakit seperti diare, kekurangan gizi, dan kondisi kulit di wilayah tersebut, menurut WHO. ● gul

## Korban Tewas Aksi Protes Kematian Mahsa Amini Jadi 31 Orang



**TEHERAN (IM)** - Sebuah LSM yang berbasis di Oslo, Norwegia melaporkan sedikitnya 31 warga sipil tewas dalam tindak kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Iran massa demonstran yang memprotes kematian Mahsa Amini.

Amini tewas di dalam tahanan setelah ditangkap oleh polisi moral Iran.

"Rakyat Iran telah turun ke jalan untuk menanggapi hak-hak dasar dan martabat manusia dan pemerintah menanggapi protes damai mereka dengan peluru," kata direktur Hak Asasi Manusia Iran (IHR) Mahmood Amiry-Moghaddam dalam sebuah pernyataan, menerbitkan jumlah korban setelah enam hari protes seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (23/9).

IHR mengatakan telah mengkonfirmasi aksi protes yang terjadi di lebih dari 30 kota dan pusat kota lainnya, meningkatkan kekhawatiran atas "penangkapan massal"

terhadap pengunjuk rasa dan aktivis masyarakat sipil.

Protes pertama kali meletus selama akhir pekan di provinsi utara Kurdistan, dari mana Amini berasal, tetapi sekarang telah menyebar ke seluruh negeri.

IHR mengatakan korbanannya termasuk kematian 11 orang yang tewas pada Rabu malam di kota Amol di provinsi Mazandaran utara di Laut Kaspia, dan enam lainnya di Babol di provinsi yang sama. Sementara itu, kata IHR, kota besar Tabriz di timur laut menyaksikan kematian pertamanya dalam aksi protes tersebut.

"Kecaman dan ekspresi keprihatinan oleh masyarakat internasional tidak lagi cukup," ujar Amiry-Moghaddam.

Sebelumnya, kelompok hak asasi Kurdi Hengaw mengatakan 15 orang telah tewas di provinsi Kurdistan dan daerah berpenduduk Kurdi lainnya di utara Iran, Rabu (20/9).

## Racuni Anaknyanya demi Uang Sumbangan, Ibu di Bangkok Divonis Mati

**BANGKOK (IM)** - Pada Januari 2020, Nattawan Rakkunjet membawa putranya yang berusia empat tahun ke rumah sakit di Thailand. Bocah itu sakit perut dan muntah darah, dan Rakkunjet memberi tahu dokter bahwa putranya menderita alergi makanan laut. Tetapi, penyelidikan menemukan bahwa Nattawan sebenarnya telah meracuni kedua anaknya — dan telah membunuh salah satunya. Sekarang, ibu kejam itu telah dijatuhi hukuman mati.

Diwartakan Bangkok Post, Nattawan mengadopsi salah satu anaknya, perempuan, pada 22 April 2015. Tak lama setelah adopsi, Nattawan mulai memberi makan putrinya yang dicampur dengan "zat korosif". Gadis itu semakin sakit, muntah darah, dan menderita sakit perut. Pada Agustus 2019, dia meninggal karena peradahan internal.

Meskipun dokter tidak memperlakukan kematian gadis itu sebagai hal yang mencurigakan pada saat itu, kecurangan mereka muncul pada Januari 2020, ketika Nattawan kembali ke rumah sakit. Kali ini, putra kandungnya menderita gejala serupa. Bangkok Post melaporkan bahwa Nattawan mulai meracuni putranya ketika dia berusia 2 tahun, pada September 2017, dan berlanjut hingga awal 2020.

Dokter memeriksa bocah itu dan menemukan bahwa dia tidak menderita alergi makanan laut. Sebaliknya, menurut Vice, mereka menemukan bahwa dia mengalami infeksi perut yang parah. Tetapi ini bukan infeksi perut biasa. Para dokter menemukan bahwa mulut, perut, dan usus anak laki-laki itu mengandung jejak bahan kimia korosif yang ditemukan di pembersih kamar mandi.

Pada 18 Mei 2020, Nattawan Rakkunjet ditangkap. Seperti yang dilaporkan Bangkok Post, pihak berwenang Thailand mendakwa Nattawan dengan perdagangan manusia karena menggunakan anak-anak untuk meminta sumbangan, pembunuhan dan percobaan pembunuhan, melakukan penipuan, dan memasukkan informasi palsu ke dalam sistem komputer.

Mengapa meracuni anak-anaknya? Pengadilan menemukan bahwa motivasi Nattawan Rakkunjet terutama adalah finansial. Setelah dia memposting foto putra dan putrinya yang terlihat sakit secara online, orang asing menawarkan uang kepadanya melalui media sosial. Vice melaporkan bahwa polisi menemukan 20 juta baht (sekitar Rp8 miliar) di rekening bank Nattawan yang mereka yakini diambil dari sumbangan online.

Dilansir dari All That Interesting, Nattawan dinyatakan bersalah atas semua tuduhan terhadapnya. Dia juga mengaku meracuni anak-anaknya, tetapi pengadilan memutuskan bahwa karena Nattawan hanya mengaku setelah dihadapkan dengan banyak bukti yang memberatkannya, pengakuannya tidak akan menghasilkan pengurangan hukuman. Pada akhirnya, pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman mati padanya.

Pengadilan juga memutuskan bahwa Nattawan harus mengembalikan sumbangan senilai 42.000 baht (sekitar Rp16,8 juta), dan menyita ponsel yang dia beli menggunakan uang yang dia peroleh secara online dengan memposting foto anak-anaknya.

Menurut Bangkok Post, sekitar 300 orang telah dieksekusi di Thailand selama 70 tahun terakhir. Laju eksekusi cukup lambat — Amnesty International melaporkan bahwa eksekusi terjadi pada 2003, 2009, dan 2018 — tetapi ratusan orang berada di hukuman mati masih menunggu eksekusi.

Pada 2018, menurut Kementerian Kehakiman, 510 orang terpidana mati di Thailand. Sembilan puluh empat dari mereka adalah perempuan, dan lebih dari setengahnya telah dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran terkait narkoba. Seperti yang dilaporkan Amnesty International, hukuman mati di Thailand tetap wajib untuk banyak kejahatan, termasuk pembunuhan berat. Dengan demikian, Nattawan Rakkunjet mungkin akan berada di hukuman mati selama bertahun-tahun yang akan datang. Untuk saat ini, tidak ada kabar jika dia berencana untuk mengajukan banding atas hukumannya. ● gul

memberatkannya, pengakuannya tidak akan menghasilkan pengurangan hukuman. Pada akhirnya, pengadilan Thailand menjatuhkan hukuman mati padanya.

Pengadilan juga memutuskan bahwa Nattawan harus mengembalikan sumbangan senilai 42.000 baht (sekitar Rp16,8 juta), dan menyita ponsel yang dia beli menggunakan uang yang dia peroleh secara online dengan memposting foto anak-anaknya.

Menurut Bangkok Post, sekitar 300 orang telah dieksekusi di Thailand selama 70 tahun terakhir. Laju eksekusi cukup lambat — Amnesty International melaporkan bahwa eksekusi terjadi pada 2003, 2009, dan 2018 — tetapi ratusan orang berada di hukuman mati masih menunggu eksekusi.

Pada 2018, menurut Kementerian Kehakiman, 510 orang terpidana mati di Thailand. Sembilan puluh empat dari mereka adalah perempuan, dan lebih dari setengahnya telah dijatuhi hukuman mati karena pelanggaran terkait narkoba. Seperti yang dilaporkan Amnesty International, hukuman mati di Thailand tetap wajib untuk banyak kejahatan, termasuk pembunuhan berat. Dengan demikian, Nattawan Rakkunjet mungkin akan berada di hukuman mati selama bertahun-tahun yang akan datang. Untuk saat ini, tidak ada kabar jika dia berencana untuk mengajukan banding atas hukumannya. ● gul

## AS Kembali Beri Bantuan Kemanusiaan Rp 2,5 T untuk Rohingya

**WASHINGTON (IM)** - Amerika Serikat (AS) mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar US\$ 170 juta (Rp 2,5 triliun) untuk warga Muslim Rohingya, baik yang ada di Myanmar maupun yang mengungsi ke negara lainnya terutama Bangladesh.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (23/9), bantuan tambahan untuk etnis minoritas Muslim Rohingya itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dalam pernyataannya pada Kamis (22/9) waktu setempat.

"Dengan pendanaan baru ini, total bantuan kami dalam menanggapi Krisis Pengungsi Rohingya telah mencapai nyaris US\$ 1,9 miliar (Rp 28,5 triliun) sejak Agustus 2017, ketika lebih dari 740.000 warga Rohingya terpaksa mengungsi ke tempat yang aman di Cox's Bazar, Bangladesh," ucap Blinken.

Bantuan itu diumumkan sebulan setelah badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan pendanaan untuk membantu pengungsi Rohingya di Bangladesh 'sangat kurang dari kebutuhan'.

Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp kemuh yang ada di



Bangladesh bagian selatan kamp pengungsi terbesar di dunia. Para pengungsi Rohingya di sana hanya memiliki prospek yang kecil untuk pulang ke Myanmar, di mana mereka tidak memiliki status kewarganegaraan dan hak-hak lainnya.

Babak baru bantuan kemanusiaan AS untuk Rohingya itu, sebut Blinken, akan mencakup US\$ 93 juta yang disalurkan melalui Departemen Luar Negeri dan US\$ 77 juta yang disalurkan melalui Badan PBB untuk Pembangunan Internasional.

Blinken juga menambahkan bahwa dana lainnya sebesar US\$ 138 juta telah dialokasikan secara spesifik untuk program-program di Bangladesh. Blinken juga menyatakan AS tengah bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh dan dengan Muslim Rohingya untuk mencari solusi atas krisis tersebut.

Sebagian besar warga Muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar ke Bangladesh saat operasi penindakan dilancarkan militer Myanmar tahun 2017 lalu. PBB menyebut operasi militer Myanmar itu dilakukan dengan niat genosida.

Dalam pernyataannya pada Kamis (22/9) waktu setempat, Blinken menyebut banyak pengungsi Rohingya merupakan "korban selamat dari kampanye genosida dan kejahatan kemanusiaan dan pembersihan etnis".

Myanmar membantah telah melakukan genosida dan mengesakan melakukan operasi yang sah melawan para pemberontak yang menyerang pos-pos polisi setempat. Namun diketahui bahwa Myanmar tengah menghadapi dakwaan genosida di Mahkamah Internasional di Den Haag atas kekerasan pada Rohingya itu. ● ans

## Terbukti Korupsi, Mantan Menteri Kehakiman Tiongkok Divonis Hukuman Mati

**BEIJING (IM)** - Pengadilan Tiongkok menjatuhkan hukuman mati kepada mantan menteri kehakiman, Fu Zhenghua (67), Kamis (22/9). Dia dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi lebih dari 16 juta dolar AS.

Dalam putusannya, Pengadilan Rakyat Menengah Hangchun di Provinsi Jilin memberikan penangguhan hukuman selama dua tahun kepada Fu Zhenghua. "Setelah penangguhan hukuman mati selama dua tahun, hukuman Fu dapat diubah menjadi penjara seumur hidup sesuai dengan hukum, tetapi tidak ada pengurangan lebih lanjut atau pembebasan bersyarat yang akan diberikan kepadanya," demikian bunyi putusan pengadilan seperti dilaporkan China Global Television Network (CGTN).

Fu menjabat sebagai menteri kehakiman Tiongkok pada Maret 2018 hingga April 2020. Dia didakwa "mengambil keuntungan" dari posisinya antara tahun 2005 dan 2021, termasuk menerima suap senilai lebih dari 117 juta yuan atau hampir setara 17 juta dolar AS. Fu pun dianggap melanggar hukum untuk keuntungan pribadi. Pengadilan telah

mencabut hak politik Fu seumur hidup dan menyita semua harta pribadinya.

Selain menteri kehakiman, Fu juga pernah menjabat beberapa posisi lainnya, antara lain kepala Biro Keamanan Publik Kota Beijing, wakil menteri keamanan publik, dan wakil kepala Komite Nasional Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok untuk Urusan Sosial dan Hukum (CPPCC).

Selain korupsi, pengadilan menemukan bahwa Fu telah menyembunyikan bukti dugaan kejahatan serius yang dilakukan oleh saudaranya Fu Weihua saat menjabat sebagai kepala biro keamanan publik Beijing antara 2014 dan 2015. "Penyembunyian ini memungkinkannya Fu Weihua untuk menghindari penuntutan untuk waktu yang lama," kata pengadilan dalam putusannya.

Pengadilan menilai Fu menerima "hukuman ringan" karena dia "mengakui semua kejahatannya dan mengaku bersalah selama penyelidikan. Dia pun memberikan petunjuk untuk kasus-kasus penting dan telah kooperatif dalam mengembalikan keuntungan ilegalnya. ● gul



ANAK-ANAK YANG TERKENA DAMPAK BANJIR DI PAKISTAN  
Anak-anak yang terkena dampak banjir menghadiri kelas di sekolah darurat di pinggiran Peshawar, Pakistan, pada Kamis (22/9). Dalam pidatonya di konferensi Hari Perdamaian Internasional, yang diselenggarakan oleh Komisi Pendidikan Tinggi Pakistan (HEC), Menteri Perencanaan, Pembangunan dan Inisiatif Khusus Pakistan Ahsan Iqbal mengimbau para pelajar negara itu menjadi penggerak dan menyiapkan makanan untuk anak-anak dan ibu-ibu di daerah yang terkena dampak banjir.